

## PERBANDITAN DI BATAVIA MASA POLITIK LIBERAL HINDIA BELANDA 1870-1930

Enggar Istiyana

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta  
[enggaristiyana.2020@student.uny.ac.id](mailto:enggaristiyana.2020@student.uny.ac.id)

### Abstrak

Peristiwa perbanditan sebagai bentuk pergolakan sosial masyarakat Jawa masa Hindia Belanda mampu menunjukkan adanya permasalahan sosial. Kajian ini akan mengeksplor sejarah Hindia Belanda yang bukan hanya membahas bentuk penjajahan saja, namun terkait pergolakan sosial yang dilakukan rakyat yang masih diabaikan. Penelitian ini dilakukan juga untuk mengidentifikasi secara rinci apa penyebab dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan metode interpretasi sumber primer penelitian ini menjadi tulisan yang menunjukkan kegaduhan bandit dalam lingkup pedesaan masa Hindia Belanda. Hasil penelitian ini mengungkapkan argumen bahwa perbanditan pada masa Hindia Belanda dalam kurun waktu 1870-1930 memperlihatkan situasi rakyat dan pemerintah yang mengalami pergeseran dari sistem Tanam Paksa menuju Ekonomi Liberal. Tindak kriminal perbanditan yang dilakukan oleh para bandit Batavia tidak semata-mata untuk memperkaya diri sendiri melainkan juga untuk mensejahterakan rakyat kalangan bawah. Aksi perbanditan yang semakin meningkat dan hampir setiap malam terjadi membuat sistem keamanan pemerintah Kolonial terganggu. Selain itu, bandit Batavia mengajak rakyat untuk membangun kekuatan agar mau melawan atas tindasan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Bandit Batavia mengkampanyekan kehidupan yang lebih sejahtera dengan cara menjarah dan mengambil hak-hak rakyat yang semestinya diterima secara paksa. Kajian ini menjelaskan konsekuensi yang diterima rakyat karena melakukan pergolakan sosial dengan munculnya berbagai respon pemerintahan Hindia Belanda untuk mempertahankan keamanan.

**Kata Kunci:** Ekonomi Liberal, Bandit Sosial, Batavia.

### Abstract

*The incident of banditry as a form of social upheaval for the Javanese people during the Dutch East Indies was able to show the existence of social problems. This study will explore the history of the Dutch East Indies, which does not only discuss the forms of restrictions, but also relates to the social upheavals carried out by the neglected people. This research was also conducted to identify in detail the causes and how the handling was carried out by the Dutch East Indies government. With the primary source interpretation method, this research becomes a writing that shows the commotion of bandits in the rural areas of the Dutch East Indies period. The results of this study reveal the argument that banditry during the Dutch East Indies period in the period 1870-1930 was in the situation of the people and government which experienced a shift from the Cultivation System to a Liberal Economy. The criminal acts of banditry carried out by the Batavian bandits were*

*not solely for themselves but also for the welfare of the lowerclass people. The increasing acts of banditry and almost every night made the colonial government's security system disrupted. In addition, the Batavian bandits invited the people to build strength so that they would fight against the oppression given by the Dutch East Indies government. The Batavian bandits campaigned for a more prosperous life by looting and taking the people's rights that should have been accepted by force. This study explains the consequences received by the people for carrying out social upheaval with the emergence of various responses from the Dutch East Indies government to maintain security.*

**Keywords:** *Liberal Economy, Social Bandits, Batavia.*

## **PENDAHULUAN**

Periode kolonial Belanda menduduki Indonesia berlangsung dalam waktu yang panjang dan merubah Indonesia sebagai koloni yang disebut Hindia Belanda. Disaat kolonisasi terjadi banyak sekali kebijakan yang menyengsarakan rakyat misalnya kebijakan Tanam Paksa. Pemerintah Belanda menerapkan kerjasama dengan Bupati untuk mendapat keuntungan besar mencapai 823 juta dalam kurun waktu 1813-1877 (Bernard, 2016: 22). Tentu saja hal ini berbanding terbalik dengan kondisi rakyat yang pada saat itu justru mengalami penderitaan seperti kemiskinan, kelaparan dan krisis kesehatan. Selesaiannya kebijakan Tanam Paksa nyatanya tidak menghentikan penderitaan rakyat karena Belanda kembali menerapkan kebijakan Politik Liberal. Dimana pemerintah Kolonial melakukan pembangunan perusahaan-perusahaan perkebunan besar di Nusantara. Dibuktikan pada 1870 pemerintah Belanda menghapuskan sistem apanage dan menggantikannya dengan sistem penguasaan tanah perorangan. Hal ini menunjukkan pemerintah Kolonial semakin ingin menguasai seluruh lapisan kehidupan masyarakat di Nusantara karena penguasa perkebunan lebih senang menyewa tanah langsung dari petani. Ekonomi rakyat semakin diperburuk dengan kebijakan ini, penyewaan tanah yang dilakukan meningkatkan jumlah kemiskinan di pedesaan.

Semakin buruknya kondisi perekonomian petani, menimbulkan perasaan tidak puas dengan kebijakan pemerintah Kolonial. Ketidakpuasan seperti apa yang ditunjukkan akan memunculkan tindakan destruktif dan kriminal seperti pencurian,

perampokan dan kejahatan lainnya terhadap para penguasa perkebunan. Para petani yang melakukan bentuk protes ini oleh pemerintah Kolonial disebut sebagai bandit. Bagi masyarakat bandit adalah kaum pembela umat yang lemah serta pemberani yang menentang kebijakan pemerintah Kolonial atas ketidakadilan yang dialami rakyat. Sedangkan pemerintah Kolonial menganggap bandit adalah sekelompok orang yang mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Perbanditan meluas hingga wilayah Batavia, disana penduduk memiliki jagoan yang mereka sebut sebagai Robin Hood. Para bandit sosial terketuk hatinya melihat penderitaan di Batavia. Mereka akan menyebar keseluruh wilayah Jawa untuk membela penderitaan rakyat. Sehingga setiap kali perbanditan meluas di beberapa wilayah pemerintah Kolonial menambah dan memperkuat keamanan dengan mengerahkan polisi. Lantas mengapa usaha pemerintah Kolonial akan selalu gagal? Karena pemerintah Kolonial tidak memahami secara mendalam latar belakang munculnya bandit di wilayah perkebunan yang didominasi oleh berbagai tekanan sehingga petani tidak diberikan kesempatan untuk bergerak aktif.

Perbanditan muncul di pedesaan yang dekat dengan wilayah perkebunan didasari oleh desakan dan tekanan yang diberikan oleh penguasa kepada petani. Perusahaan perkebunan mencoba untuk menguras kekayaan pedesaan tanpa memberikan kesejahteraan pada petani. Kehidupan petani menjadi semakin lemah dan berada dibawah garis subsistensi. Keadaan ini menjadi semakin parah apabila dalam waktu yang bersamaan di wilayah tersebut terjadi bencana alam. Akibatnya banyaknya jumlah kelaparan dan kematian menjadi suatu hal yang wajar dan biasa di pedesaan. Pemerintah Kolonial pernah berusaha untuk menanggulangi kelaparan dan kemiskinan di pedesaan dengan melakukan *Mindere Welvaart Onderzoek* namun usahanya gagal.

Melihat ketidakamanan wilayah Hindia Belanda oleh serangan bandit pada saat itu pemerintah Kolonial akhirnya membuat kebijakan untuk membasmi bandit. Usaha yang dilakukan ialah mengirimkan unit *Morsose* yakni unit militer yang bertugas memerangi bandit. Petugas polisi dibentuk pada 1890 dengan divisi utama *Algemene Politie* atau polisi umum yang terdiri atas *Stad Politie* atau polisi kota, *Veldpolitie* atau polisi lapangan dan *Gewestelijk Recherche* dan *Bestuurs Politie*.

Kemudian untuk mendukung usaha dibentuknya kepolisian, pemerintah Kolonial juga membentuk unit *jagabaya* yang merupakan polisi desa dengan tugas mencegah bandit di malam hari. Namun jumlah mereka tidak cukup banyak sehingga perbanditan masih merajalela di wilayah tersebut. Bagaimana langkah yang diambil pemerintah Kolonial atas meningkatnya bandit? Usaha lain yang dilakukan pemerintah Kolonial adalah menyebarkan informasi mengenai bahaya bandit yang akan menguras kekayaan yang sudah disimpan baik di gudang maupun di rumah masyarakat. Informasi yang diberikan bertujuan untuk menghimbau rakyat agar membangun pagar rumah, menutup jalan masuk desa di malam hari dan melakukan ronda di pos jaga.

## **METODE**

Pada penelitian ini rencanakan akan menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif dan analisis yang dilakukan cenderung dilakukan secara induktif dan makna menjadi hal yang esensial. Dari beberapa pendekatan semacam pendekatan kualitatif, pendekatan penelitian studi kasus yang akan digunakan untuk mempelajari secara intensif latar belakang kondisi masyarakat dimasa sekarang sekaligus mengamati interaksi yang terjadi antara individu dengan kelompok, lembaga atau pemerintahan di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini yang akan lebih ditonjolkan ialah penelitian sendiri. Sumber yang akan digunakan berupa surat kabar sejaman seperti “Bataviaasch Nieuwsblad” dan berbagai referensi sumber.

Pengumpulan sumber online/offline dan observasi diharapkan akan mampu mengkonstruksi mengenai peristiwa, perasaan, motivasi, kepedulian, masa lalu dan lain-lain dari masyarakat. Pengumpulan sumber online/offline dilakukan dengan mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akan bermanfaat untuk memaksimalkan penelitian berupa sampel data. Sedangkan untuk teknik observasi akan dibagi menjadi tiga tahap. *Pertama*, mengamati tindakan partisipan (masyarakat) serta tokoh umum. *Kedua*, observasi yang dilakukan bersifat terus terang langsung kepada partisipan dan penyamaran agar kenyamanan partisipan

tidak terganggu. *Ketiga*, untuk mendapatkan jawaban yang murni tanpa paksaan maka pengamat bisa bertindak sebagai partisipan.

Penelitian ini dibentuk dengan empat tahapan yakni pemilihan sumber (heuristik), pengujian sumber (kritik sumber), interpretasi dan terakhir historiografi. Secara terperinci tahapan tersebut memiliki tujuan masing-masing yang akan memberikan hasil rekonstruksi yang objektif. *Pertama*, pemilihan sumber bertujuan untuk menemukan fakta dari sebuah peristiwa sejarah dan yang akan dibahas yakni masalah sosial masa Hindia Belanda. Fakta dapat berupa kebenaran yang bersifat nisbi. Sumber sejarah sendiri memiliki berbagai jenis seperti sumber primer, sekunder, tertulis, dan lisan yang sezaman dengan perbanditan. *Kedua*, pengujian sumber atau sering disebut dengan kritik sumber merupakan kegiatan pengujian fakta yang telah ditemukan pada tahapan sebelumnya. Kritik sumber terbagi menjadi dua yakni kritik intern dan ekstern. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan kredibilitas sumber yang digunakan. Sumber yang membahas mengenai berbanditan harus dipastikan bahwa sumber yang dipakai benar-benar terpercaya. *Ketiga*, tahap interpretasi dilakukan setelah fakta sumber sudah ditemukan kemudian menyusunnya dengan menghubungkan kausalitas antar fakta. Proses interpretasi dilakukan dengan dua cara yakni interpretasi analisis dan sintesis. *Terakhir*, historiografi adalah tahap penulisan sejarah yang menghasilkan tulisan sejarah dari sumber penelitian yang telah dikumpulkan, diverifikasi, dan ditafsirkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Agraris Wet 1870 Sebagai Penyebab Muncul Perbanditan**

Kemunculan bandit tidak lepas dari masalah sosial di pedesaan yakni hilangnya fungsi tanah. Tanah yang dijadikan sebagai sumber utama kehidupan petani justru diperdaya oleh pemerintah Kolonial. Berakhirnya Sistem Tanam Paksa membawa kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu ke dalam periode baru yakni berdirinya perusahaan perkebunan swasta di Hindia Belanda. Para pemerintah Kolonial membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar

dengan cara mengait investor asing agar menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial memperkuat usaha ini dengan melahirkan undang-undang *Agrarische Wet* pada 1870. Undang-undang ini menjadi landasan legal-politis pemerintah Kolonial dalam memfasilitasi perusahaan kapitalis. Terdapat hak-hak tanah seperti Eigendom, Erfpacht, konsesi dan hak sewa yang jika dilihat sekilas sangat menguntungkan masyarakat Indonesia. Namun undang-undang ini nyatanya hanya dijadikan pemulus agar pemodal asing dapat berinvestasi di Hindia Belanda

Undang-undang *Agrarische Wet* pada 1870 telah memunculkan masalah baru bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, pembangunan perusahaan perkebunan swasta menyebabkan kemandegan pola pertanian di Pulau Jawa karena mengalami industrialisasi pedesaan. Pemerintah Kolonial kembali mengeksploitasi tenaga petani untuk bekerja pada perusahaan perkebunan swasta. Cara yang digunakan pemerintah Kolonial untuk mendapat tenaga petani adalah dengan memberikan uang panjar yang akan dipotongkan dari gaji mereka. Disini terdapat kesepakatan antara pemerintah perusahaan perkebunan dengan petani dimana petani yang tidak hadir untuk bekerja setelah diberi uang panjar maka akan dicari dan didesak supaya mau memenuhi kontraknya dibantu oleh kepala desa. Petani pun tidak jarang mendapatkan hukuman apabila telah dengan sengaja melanggar kontrak yang ditentukan (Tauhid, 2009: 31). *Agrarische Wet* menjadi payung hukum para penguasa perusahaan swasta mendirikan perkebunan besar kopi, teh, gula dan kina. Implementasi dari *Agrarische Wet* menimbulkan masalah sosial di tanah partikelir (Imadudin, 2015:33-48). Dampak dari adanya Undang-undang *Agrarische Wet* dan UU Gula 1870 ialah banyaknya perusahaan swasta yang berdiri di tanah Nusantara (Wisnuwardana, 2015:6). Tanah partikelir oleh tuan tanah Eropa dan Cina menjadi ladang uang mereka. Sementara, untuk para petani pribumi tanah partikelir merupakan beban terutama untuk petani penyewa dan buruh. Petani masih harus dibebankan dengan pajak dan layanan tenaga kerja untuk tuan tanah. Tuan tanah sangat sewenang-wenang terhadap petani hingga sudah melepas hak petani atas tanah dan rumah mereka.

Petani menjadi manusia yang paling menderita di Hindia Belanda tatkala pada 1929 terjadi krisis *malaise*. Krisis ini terjadi saat bursa saham New York Wall

Street mengalami anjlok, dikenal dengan peristiwa Black Tuesday. *Black Tuesday* merupakan peristiwa ambruknya pasar modal Amerika dan menjadi krisis ekonomi paling berat yang pernah terjadi di dunia. Akibat dari peristiwa ini adalah banyak bank bangkrut dan uang nasabah yang tidak bisa dikembalikan. Pusat industri terpaksa gulung tikar serta angka pengangguran merambat ke negara-negara lain. Atas peristiwa tersebut perkebunan Hindia Belanda mengalami gagal panen dan menghancurkan perekonomian rakyat. Penguasa perkebunan akhirnya menerapkan kebijakan pengurangan upah kepada petani serta kesempatan kerja yang dibatasi. Meskipun nantinya perekonomian Hindia Belanda terselamatkan kembali. Namun luka sudah membekas di hati para petani yang dibuat menderita atas kebijakan demi kebijakan yang tidak manusiawi.

Petani melakukan perlawanan sosial dengan isu utama yakni ketidakadilan dan kemiskinan. Atas perlakuan kejam dari tuan tanah kepada petani tersebut, memicu tumbuhnya solidaritas. Solidaritas akhirnya menjerumuskan pada aksi kriminalitas sebagai protes sosial tidak terorganisir. dengan aksi kriminalitas para petani berusaha untuk mengembalikan hak para tani yang direnggut oleh tuan tanah. Aksi ini diletakan ke dalam bingkai perbanditan social (Wisnuwardana, 2015: 20). Akhirnya seseorang yang menjadi bandit oleh daerahnya tidak dianggap sebagai tindak kejahatan melainkan para tuan tanah lah yang menyebutnya sebagai pengganggu tatanan kolonial.

## **B. Kemunculan Bandit di Jawa Tahun 1870-1930**

Pembukaan perusahaan perkebunan di tanah pedesaan berdampak buruk pada kehidupan petani di desa. Seluruh petani hanya diperbolehkan menanam tanaman ekspor dan melupakan tanaman makanan pokok seperti padi. Sudah begitu upah yang diterima pun tidak sesuai dengan beratnya pekerjaan yang diterima. Hal ini yang menjadikan kehidupan petani tetap miskin meskipun tanaman ekspor dihargai mahal di Eropa. Petani yang memiliki tanggungan membiayai hidup keluarga masih dibebani dengan pembayaran pajak menimbulkan rasa tidak suka pada penguasa perusahaan perkebunan swasta atau tuan tanah pemilik perkebunan. Perasaan tidak suka petani itu menimbulkan terjadinya perbanditan di Jawa.

Rasa tidak suka petani mendorong lahirnya gerakan perlawanan di pedesaan khususnya pulau Jawa. Gerakan ini dilakukan secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan publik dan otoritas karena terorganisir dari bawah tanah dengan metode yang melanggar hukum kolonial maupun norma sosial masyarakat. Para petani dan buruh dari golongan kelas bawah akan melakukan perlawanan dengan melakukan tindakan kriminal untuk memperjuangkan hak milik petani yang dirampas. Gerakan perlawanan ini dikenal dengan sebutan Bandit. Perbanditan adalah manifestasi protes sosial yang dilakukan di wilayah perkebunan tanah sewaan. Mereka melancarkan aksi perbanditan tidak semata-mata untuk memperkaya dirinya sendiri melainkan sebagai bentuk protes atas perubahan yang terjadi di wilayah pedesaan. Mereka akan membagi-bagikan hasil rampokan kepada petani lain, bandit seperti ini muncul untuk membela dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik petani. Bandit yang demikian disebut bandit sosial.

Fenomena bandit sosial identik dengan pedesaan karena bandit jenis ini jarang terjadi di perkotaan. Kondisi pedesaan saat itu masih kental dengan tradisi kejawen. Pemimpin dunia bawah tanah biasanya dibekali oleh ilmu kebal yang ia peroleh dari guru ilmu hitam. Untuk mendapatkan ilmu kebal tersebut para bandit harus melakukan ritual khusus, ketika bandit dirasa sudah mampu maka ia wajib untuk melanjutkan ajaran yang sudah ia dapat dari guru sebelumnya kepada bandit lain. Selain itu ia akan diberikan sebuah jimat agar murid-murid dari guru ilmu hitam tersebut dapat selamat saat melakukan tindak kejahatan. Jimat yang diberikan tentu mempunyai daya magis sebagai penolak bala, biasanya jimat dapat berupa rapalan doa-doa selalu dibaca agar terlepas dari mara bahaya.

Ilmu yang harus dikuasai bandit tidak hanya berupa teknik bela diri melainkan ilmu *pendanyangan* dan *kalamuding* juga harus dikuasai. Ilmu kejawen digunakan untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan aksi kriminal. Mereka harus menentukan sasaran dengan perhitungan kejawen yakni kombinasi nilai tujuh hari dan lima hari pasaran. Jika aksi kriminal mereka gagal dan berujung kejaran polisi maka bandit akan menggunakan ilmu *raja muka* untuk berlari sambil melemparkan kepalan tanah keramat untuk mencari delapan penjuru arah mata angin. Sedangkan doa-doa rapalan digunakan untuk membuat calon korban tidak



terbangun ketika bandit menjarah rumahnya. Dengan ilmu yang dikuasai oleh pemimpin bandit maupun anak buah diharapkan mampu menjaga mereka agar tetap selamat (Runturambi, 2017: 30).

Para anggota bandit akan berusaha saling menjaga satu sama lain termasuk bersumpah bersama untuk menjaga rahasia dan saling setia. Dalam ucap sumpah yang para bandit lakukan terdapat ritual yang cukup unik, yakni meminum air yang bercampur tetesan darah. Dalam sebuah kendi air yang sudah bercampur darah dipercaya untuk menjaga kesetiaan para bandit dan jika diantara mereka ada yang melanggar maka air yang sudah diminum akan berubah mencari racun mematikan.

Di Jawa perbanditan dikenal dengan istilah *kecu* dengan aksi berupa pencurian harta kekayaan dan hewan, serta pembakaran. Gerombolan *kecu* dipercaya memiliki ilmu kebal yang akan membuatnya sulit untuk ditaklukan. Orang yang paling berpengalaman mengenai perkecuan akan dijadikan pemimpin yang diberi nama *benggol*. Tentu saja *benggol* sebagai pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keamanan anggotanya. *Benggol* akan dibantu oleh wakilnya untuk mengatur strategi perkecuan. Berhasil atau tidaknya aksi bandit ditentukan oleh pemimpin yang mengatur jalannya aksi. Ketika aksi yang dipimpinya berhasil dan lolos dari kejaran polisi maka nama *benggol* akan menjadi tersohor di desa. Nama-nama *benggol* kemudian akan dialihkan sesuai dengan ciri khasnya sendiri. Misalnya *benggol* di Yogyakarta dan Surakarta yang diberi nama alias Pentung Pinanggul dengan ciri khas membawa tongkat pentungan. Gobang Kinosek yakni *benggol* dengan keahlian menggunakan pisau besar untuk merusak hasil perkebunan. Kandhang Jinongkeng ialah *benggol* dengan kemampuan untuk mendongkel sesuatu yang berat atau besar. Kemudian Dadung Sinedel yang merupakan tali untuk mengikat hewan peliharaan. *Benggol* Dadung Sinedel biasanya memiliki motif untuk mencuri ternak yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan ke pabrik para penguasa perusahaan perkebunan. Tanpa adanya tenaga angkut maka sudah dipastikan pemasaran hasil perkebunan akan terhambat. Kerja *benggol* dibantu juga oleh dua orang dengan posisi penting didalamnya yakni posisi *telik sandi* yang bertugas untuk memberikan informasi terkait wilayah dan korban sasaran. Ia akan berkoordinasi dengan *benggol* bilamana

informasi yang didapat mengenai calon korban sudah cukup memadai. Adapun posisi *canguk* posisi ini akan bertugas diluar sebagai pengawas dan pemberi kode kepada kelompok kecu saat aksi bandit berlangsung (Nanggoro, 2019).

### **C. Situasi Perbanditan di Batavia 1870-1900**

Sementara di Jawa perbanditan di dominasi oleh kecu, bandit di Batavia sebagian besar dikontrol oleh Jagoan. Dengan kesaktian pula mereka dapat membuat korbannya tertidur sehingga para bandit dapat leluasa menjarah rumahnya. Aksi perbanditan di Batavia sangat beragam sehingga dikelompokan menjadi beberapa tindak kejahatan yakni, perampokan, pencurian, penyalahgunaan jabatan dan perlawanan terhadap pemerintah. Perilaku kriminal di Batavia dilakukan sebagai wujud protes oleh kelompok masyarakat yang tersingkirkan dalam kehidupan sosial ekonomi Batavia. Selain itu kondisi kesehatan di Batavia yang semakin buruk dengan 4294 orang terkena demam berdarah. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa penyebab terjadinya kriminalitas di Batavia ialah perubahan ekonomi dalam kebijakan ekonomi liberal.

Kriminalitas yang terus meningkat, pemerintah Kolonial bertindak keras untuk menghadapi perbanditan yang setiap hari di beritakan. Pemerintah memberlakukan hukum gantung kepada para pengganggu keamanan yakni bandit. Akan tetapi, hukuman gantung hanya diberlakukan untuk bandit Asing di tahun 1930. Hukuman dilakukan dilapangan terbuka (Jatinegara) dan disaksikan oleh banyak orang yang datang dan berkumpul di *Meester Cornelis*. Hukuman lain yang diberikan pemerintah Kolonial dilaksanakan dengan hukuman penjara dan kerja paksa. Sebab hukuman tersebut dirasa cocok diberikan kepada rakyat pribumi karena hukuman ini bisa membuat orang menjadi gila bahkan bunuh diri (Kurnia, 2012: 62).

### **D. Praktik dan Tokoh Perbanditan di Batavia**

Para bandit memiliki target yang akan mereka tuju yakni pihak yang telah menghilangkan sumber daya ekonomi rakyat. Orang-orang ini mencakup tuan

tanah, kepala desa, pemerintah Belanda dan orang Cina. Cara kerja bandit saat melakukan aksinya tidak hanya pencurian, mereka juga melakukan perampokan, pemukulan dan pembunuhan. Dalam aksinya ini bandit tidak melakukannya sendirian, biasanya dalam satu kali aksi terdapat lima sampai belasan bandit yang terlibat. Mereka memiliki struktur kerja dengan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Dalam buku *Bandit-Bandit Pedesaan Di Jawa: Studi Historis 1850-1942* dikatakan di setiap daerah pasti memiliki legenda banditnya sendiri-sendiri, misalnya di Batavia. Sejak abad ke-19 Batavia sudah menjadi pelabuhan besar yang didiami oleh multietnik (Suhartono, 2010: 151). Dengan begitu banyak pedagang asing yang singgah bahkan menetap dan menciptakan kampungnya sendiri di Batavia. Misalnya orang-orang Cina, India, dan Arab yang memiliki kampungnya sendiri di Batavia untuk berdagang. Selain berdagang orang-orang asing itu banyak yang menjadi pekerja buruh di perkebunan swasta. Tentu saja mereka termasuk kedalam golongan pekerja buruh yang mendapatkan gaji yang layak di atas upah para petani pribumi. Upah yang besar membuat pekerja dari Cina, India dan Arab ini hidup berkecukupan.

Pada tahun 1924 terjadi peristiwa resistensi anti-Cina di Tangerang, Batavia. Peristiwa ini bukan termasuk kedalam aksi perbanditan, akan tetapi bertujuan untuk membebaskan petani dari cengkaman tuan tanah Cina. Pemimpin dalam aksi ini dikenal dengan Kaiin Bapa Kayah yang merupakan seorang petani kecil (Suhartono, 2010: 154). Petani pada saat itu dikenakan kewajiban untuk mengolah tanah partikelir yang disewa orang Cina dengan luas yang diusahakan Cina tiga kali lebih luas dari petani pangkalan. Meskipun ditentang oleh Polisi, para Kaiin tetap bergerak untuk mengusir orang Cina agar *cuke* dan uang kompenian dapat dihapuskan.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan nasib petani pribumi. Mereka hanya diberi upah kecil ditambah dengan pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya. Tidak jarang dari petani yang tidak sanggup membiayai keluarga makan dan membayar pajak. Petani yang tidak bisa membayar pajak oleh pemerintah Kolonial diajukan ke pengadilan dan dikenakan denda. Tuntutan yang semakin besar

membuat petani semakin menderita, bahkan petani tidak segan-segan untuk dipenjarakan atau dibakar harta benda yang tersisa seperti stok pangan dan rumah. Hal-hal seperti inilah yang kemudian mengetuk hati para tokoh bandit sosial untuk melakukan pembelaan dan meringankan penderitaan petani dengan melakukan perlawanan.

Di Batavia bandit sosial dikenal dengan sebutan Jago. Jago dipandang oleh masyarakat sebagai seseorang yang pemberani dalam membela kepentingan rakyat. Sebutan Jago sering diberikan imbuhan menjadi Jagoan tatkala seseorang tersebut justru melakukan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat, sehingga para Jagoan ini oleh masyarakat disebut sebagai pengecut. Jagoan ini muncul dari golongan pelaku kriminal yang sudah pernah merasakan demakan penjara namun masih melakukan kejahatan atas perintah pemerintah. Pemerintah akan membutuhkan tenaga para jagoan dan membayarnya untuk kepentingan pribadinya.

- Si Pitung

Di Batavia terkhusus di wilayah Tanah Abang, Jago bermunculan atas beberapa penyebab yakni kesengsaraan yang dirasakan oleh petani dan praktik Jagoan (pemerasan) yang marak terjadi di pasar Tanah Abang. Jago didaerah ini dipimpin oleh sosok legendaris bernama Pitung. Pitung merujuk kepada sosok yang berselimut legenda. Nama Pitung sendiri dalam bahasa Sunda berarti *Pitulung* atau Penolong. Dilihat dari namanya saja maka sudah jelas bahwa sosok ini merupakan pahlawan bagi rakyat Batavia. Ia melakukan aksi pencurian lalu membagikannya kepada masyarakat.

Dalam surat kabar *Bataviaasch Nieuwsblad 1892* termuat aksi pencurian yang dilakukan oleh Pitung. Dalam beberapa versi cerita Pitung dikisahkan penyebab ia melakukan perbanditan ialah pengalaman pribadi. Ia sempat mempunyai seekor kambing yang hendak ia jual untuk mencukupi kehidupan. Namun ketika kambing berhasil dijual, uang tersebut dicuri oleh bandit atau Jagoan sejenisnya. Hal ini mendorongnya untuk melakukan aksi balas dendam dengan target korban ialah para bandit lain dan tuan tanah Belanda.

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda merespon aktivitas Pitung dengan menyebarkan poster perburuan Pitung. Dalam penyelidikan ditemukan fakta bahwa dalam aksinya Pitung dibantu oleh rekan banditnya. Pada 1892 Pitung dan rekannya dicituk oleh polisi namun melarikan diri pada 1893. Kabar kaburnya Pitung menjadi masalah pelik bagi pemerintah Kolonial Hindia Belanda terkhusus Gubernur Jendral. Polisi kembali dikerahkan untuk menaklukkannya, hanya saja Pitung dalam versi ini dianggap memiliki ilmu kebal senjata api serta dapat menghilang, dari situlah Si Pitung mendapat julukan Robin Hood dari Betawi. Akhirnya Pitung dikabarkan tewas tertembak peluru emas oleh polisi Batavia dan kisahnya termuat pada surat kabar *Hindia Olanda* dan surat kabar *De Locomotif* (Albar, 2021: 35).

- Si Entong

Aksi perbanditan di Batavia juga dilakukan oleh Si Entong. Entong akan melakukan aksi kekerasan kepada orang-orang yang bersikap sewenang-wenang kepada rakyat kecil dan petani. Pada 1916 terjadi pungutan besar-besaran yang dibebankan oleh tuan tanah kepada rakyat yang tinggal di tanah partikelir sehingga kehidupan rakyat semakin sulit dan keadaan menjadi semakin buruk. Tuan tanah membakar rumah rakyat yang tidak mampu membayar pungutan dan hutang kepada tuan tanah. Oleh sebab itu, Tuan tanah menjadi incaran korban yang akan Si Entongjarah seluruh kekayaannya.

Aksi Si Entong tentu membuat para tuan tanah marah yang kemudian meminta pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk menindaklanjuti penangkapan Si Entong. Dua tokoh Entong yang terkenal di Jatinegara, Batavia ialah Entong Tolo dan Entong Gendut. Mereka merupakan pemimpin aksi bandit sosial yang bercampur dengan motivasi politik. Kedua tokoh sama-sama tampil sebagai pembela penderitaan rakyat dan dikenal sebagai *Robin Hood* Batavia. Jika Entong Tolo, ia seorang pedagang berusia 50 tahun yang melakukan pencurian hewan dan perampokan di tanah partikelir wilayah Jatinegara dan Sawangan. Pemerintah berupaya untuk menangkap dan membuangnya keluar Jawa. Namun Entong Tolo yang sudah menjadi buronan sejak lama, bersama istri dan anaknya memilih

berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi. Hingga pada 1908 ia berhasil ditangkap dan mendapat hukuman kerja paksa di wilayah Bekasi.

Sedangkan perbanditan Entong Gendut merupakan bandit yang meneriakan suara penderitaan rakyat di wilayah tanah partikelir Tanjung Timur, Jatinegara. Pada 1916 ia mengetahui bahwa Asisten Wedana Pasar Rebo akan datang ke Taba untuk menagih hutang ke rumah-rumah rakyat. Si Entong Gendut berupaya untuk membantu menggagalkan usaha tersebut dengan mengumpulkan massa. Demi meyakinkan massa Entong Entong mengaku dirinya sebagai Ratu Adil, dimana ia membawa simbol yang mempunyai kekuatan mistik. Mengetahui dirinya akan ditangkap oleh pemerintah Kolonial Entong Gendut dan para pengikutnya mengibarkan bendera bulan sabit dan melakukan pengajian membaca Al-Quran dan doa wirid bersama-sama. Usaha tersebut mampu mengajak sebanyak 40 orang yang bergabung dalam upaya perlawanan tersebut (Purwaningsih dan Aji, 2015: 124). Bergerak maju sambil berteriak Allahu Akbar sebagai wujud *sabilillah* (Perang suci di jalan Allah). Dengan demikian perbanditan yang bermaksud melindungi petani telah menunjukkan keberanian para bandit yang diikat dengan nilai religius.

#### **E. Respon Pemerintah Kolonial Menangani Kasus Perbanditan**

Pemerintah Kolonial melakukan upaya untuk menangani kasus perbanditan ini dengan menaikkan upah para petani perkebunan dan menambah jumlah polisi namun hal ini dirasa kurang cukup. Pemerintah kolonial tidak segan untuk menembak mati para pelaku bandit. Pemerintah kolonial menganggap bahwa bandit adalah segerombol pelanggar hukum yang mengacau keamanan dan ketertiban rakyat yang harus dibasmi. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda meminta peranan penduduk untuk melakukan pengawasan berupa ronda malam serta menggerakkan kepolisian di Mangkunegaran dan Kasunanan (*djogo westi*) untuk meminimalisir tindak perbanditan. Selain itu juga membentuk kelompok reserse dibawah Asisten Residen dan Komisaris Polisi (Purwaningsih dan Aji, 2015: 124).

- Sistem Ronda Malam

Kejahatan bandit yang didominasi dikerjakan pada malam hari membuat pemerintah Kolonial memerintah petani atau penduduk untuk melakukan ronda malam. Sistem ronda di terapkan pada saat itu agar kejahatan bandit dapat mereda karena hukuman yang akan diterima jika tertangkap warga. Ronda malam ini biasa dilakukan di gardu depan pedesaan, sekaligus dibarengi dengan pembangunan pagar serta menutup akses jalan di malam hari. Cara pengejaan ini dinilai efektif karena akses jalan yang diawasi akan menyulitkan untuk pelaku bandit masuk ke desa.

Ronda menjadi tugas para lelaki di desa yang biasanya sudah dibekali ilmu beladiri untuk melawan bandit. Mereka akan mendapatkan tugasnya sendiri-sendiri yang digilir secara rutin bergantian. Para anggota diberikan senjata berupa kentongan, pedang, peluit dan borgol. Mereka juga dibebaskan untuk membawa senjata tajam atau alat sejenisnya untuk berjaga-jaga. Senjata yang biasa mereka bawa berupa *granggang* atau tombak kayu, *gembel* atau pentungan dan tali dadung untuk mengikat. Kejahatan yang bandit lakukan selain mencuri juga melakukan pembakaran gudang. Maka senjata yang tidak boleh absen dari penjagaan ialah alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran di jaman tersebut ialah kipas besar dari bambu, kain lap basah, ruas bambu untuk menampung air dan *gonthol* atau tangkai panjang. Selain itu, mereka juga dibekali ilmu untuk menginformasikan kepada penduduk bilamana kondisi desa tidak aman. Mereka harus membunyikan kentongan dengan pukulan yang memiliki makna seperti 2x ketukan yang berarti terjadi pencurian, ketukan 3x pertanda kebakaran, 4x berarti ada bencana alam dan 5x yang bermakna terjadi pencurian hewan. Dengan membunyikan kentongan tersebut mereka berharap akan mendapatkan bantuan dari penduduk agar dapat menangkap bandit secara bersama-sama. Kegiatan ronda malam dilakukan secara rutin secara bergiliran setiap hari demi menjaga keamanan desa dari ancaman bandit. Usaha pemerintah Kolonial ini dianggap berhasil karena hampir seluruh unsur dari masyarakat dan pemerintah turun tangan untuk mengatasi bandit yang berangsur-angsur mereda.

- Masuk Organisasi Kepolisian

Pemerintah Kolonial turun tangan untuk mengatasi permasalahan bandit dengan membentuk organisasi kepolisian. Organisasi yang bertujuan untuk menekan aksi bandit sosial ini mengambil alih gardu atau pos ronda untuk dijadikan pos penjagaan yang lebih terpadu. Organisasi kepolisian juga bermaksud untuk mengajak para rakyat kecil untuk menyuarakan keluh kesahnya atas bandit sebab pemerintah Kolonial yang tak kunjung mengerti atas apa yang melatarbelakangi terjadinya perbanditan (Kurnia, 2012:86-87). Organisasi kepolisian dibentuk di Hindia Belanda sejak 1897. Organisasi kepolisian di Hindia Belanda merupakan wujud dari bentuk ketakutan dan kepedulian rakyat.

Pemerintah Kolonial mendorong modernisasi organisasi kepolisian sebagai penjaga keamanan dan mempertahankan status quo kolonial. Pemerintah Kolonial memikirkan fungsi lain dari organisasi kepolisian yang harus menjaga ketertiban masyarakat, memastikan masyarakat untuk patuh pada peraturan pemerintah, dan memuaskan kebutuhan masyarakat yakni rasa aman. Meskipun demikian pada 1860 terdapat pejabat tinggi kolonial di Hindia Belanda yang mengkritik kinerja kepolisian yang tidak mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kritikan itu mendasari maraknya perbanditan yang kemudian oleh pemerintah Kolonial ditanggapi dengan didirikannya komisi kepolisian yang bertugas untuk menelaah dan mencari jalan keluar agar mutu kerja kepolisian dapat diperbaiki.

Sejak 1870 dimana bandit mulai membanjiri wilayah di Hindia Belanda, para tuan tanah, pemerintah Kolonial dan rakyat merasa was-was akan keselamatan harta benda dan keluarga. Pasalnya bandit yang melancarkan aksi perampokan tidak pernah pandang bulu untuk membunuh atau melukai hingga seluruh harta dapat dikuasai. Organisasi kepolisian menjawab rasa was-was mereka, hanya saja minimnya pelatihan kepolisian membuat pihak kepolisian sering kali gagal untuk membekukan aksi para bandit.

Kepolisian dibentuk sebagai tanggapan atas persoalan terkait memelihara dan menjaga keamanan di negara koloni. Anggota kepolisian pada masa itu didominasi oleh golongan pribumi kecuali para anak bupati yang mempunyai privilese untuk menjadi petinggi kepolisian. Ironisnya, sejak awal dibentuknya organisasi kepolisian tidak ada seorang pun dari golongan pribumi yang dimintai masukan



mengenai tugas yang harus dikerjakan pihak kepolisian. Padahal para golongan pribumi sangat paham betul apa yang melatarbelakangi motif dari para bandit yang bermunculan di wilayah Hindia Belanda pada masa itu. Hal inilah yang kemudian membuat citra kepolisian seakan runtuh karena ketidaktuntasan mereka dalam menangani kasus perbanditan di Hindia Belanda.

Negara Hindia Belanda yang penuh dengan kekerasan sangat membutuhkan polisi sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang secara aktif menjalankan kebijakan dan menegakan keamanan serta ketertiban masyarakat. Pada kenyataannya polisi di era kolonial sudah merambah ke fungsi lain yakni mencakup persoalan politik dan polisi moral. Kepolisian turut mengambil kasus yang menyangkut dengan akhlak. Pada 1937 polisi mengadakan penyelidikan atas kasus homoseksual yang terjadi dikalangan pejabat tinggi pemerintah atas mandat dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda A.W. L. Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer. Para anggota kepolisian memberantas kasus homoseksual dengan hukuman penjara yang tak jauh berbeda dengan cara mereka memberantas kasus-kasus perbanditan dan pemberontakan komunisme pada 1926 (Triyana, 2011)

Lonjakan jumlah angka perbanditan di Jawa mendorong pemerintah Kolonial untuk mengirimkan *Marsose* ke Jawa. *Marsose* merupakan pasukan dengan gaya gempur yang dahsyat pada pertahanan lawan. *Marsose* adalah unit militer Belanda dengan tugas seperti polisi diantara penduduk sipil yang dibentuk pada 1890. *Marsose* pertama kali dikerahkan untuk menangani perang Aceh (1837-1908). Pada 1920 *Marsose* tiba di Hindia Belanda, kehadirannya berupaya untuk membasmi aksi perbanditan atas perintah pemerintah Kolonial (Pribdi, 2014: 43-55).

## **KESIMPULAN**

Kriminalitas dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan di zaman apa saja, sama halnya di zaman Hindia Belanda. Kriminalitas pada masa Hindia Belanda marak terjadi sekitar tahun 1870-an dimana perubahan peraturan perkebunan yang dikenal dengan UU Agraria 1870 yang membuka peluang para investor asing untuk datang dan menanamkan modalnya. Perusahaan perkebunan swasta gempur dengan

pembangunan yang terus-menerus dilakukan. Pada saat itulah banyak petani yang menjerit akan peraturan yang semakin memperberat beban mereka.

Petani dan para rakyat pribumi kelas bawah berusaha untuk menyelamatkan hidupnya dengan tindak kriminalitas. Kriminalitas yang dilakukan dimasa itu umumnya ialah perbanditan. Aksi perbanditan tidak mereka lakukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, melainkan untuk menyamaratakan pola ekonomi rakyat dengan cara membagi-bagikan hasil rampokan. Motif utama para petani melakukan hal ini ialah ingin mentas dari belenggu pemerintah Kolonial karena tidak sedikit petani yang mengalami kemiskinan. Mereka melakukan perlawanan atas kesengsaraan dan penindasan yang diberikan pihak pemerintah Kolonial.

Pada dasarnya perbanditan pedesaan terjadi karena perubahan sosial yang memaksa petani untuk tunduk dan patuh. Kebanyakan perbanditan pula terjadi di pedesaan karena di desa masih minim perlindungan dari pihak pemerintah Kolonial. Selain itu tingkat kemiskinan di pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di kota. Kondisi umum ini mendorong mereka untuk melakukan perbanditan seperti pencurian, pembakaran, perampokan, dan pembunuhan. Aksi perbanditan dilakukan oleh beberapa orang yang bergabung dengan tujuan yang sama yakni merampas kembali hak para petani.

Aksi perbanditan yang semakin marak terjadi di malam hari menyebabkan rakyat merasa resah dan takut untuk keluar rumah. Para bandit berhasil menghadirkan rasa tidak aman dan tentram untuk para rakyat dan pemerintah kolonial. Keresahan dan kekhawatiran yang dialami memicu untuk para pemerintah kolonial meningkatkan penjagaan. Respon yang diberikan pun beragam seperti menyebarkan berita bandit, melakukan kegiatan ronda malam dan membentuk organisasi kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Surat Kabar

Dagblad van Zuidholland en's Gravenhage. 1873. "Nederl. Oost-Indie". Diakses dari <https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=bandiet+bataviaasch&coll=ddd&sortfield=date&identifier=MMKB19:000882129:mpeg21:p00006&resultidentifier=MMKB19:000882129:mpeg21:a00045&rowid=2> Delpher.nl

Tweede Blad. 1892. "Bataviaasch Nieuwsblad". Diakses dari <https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=bataviaasch+Nieuwsblad+1892&coll=ddd&sortfield=date&page=34&identifier=ddd:110618565:mpeg21:a0037&resultsidentifier=ddd:110618565:mpeg21:a0037&rowid=1>

### **Buku**

Bernard H.M.V. 2016. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Hien, Injo Bian. 1937. *Priboedinja Satoe Kepala Bandiet*. Uigeversmij. Diakses dari <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/176734>.

Pribdi, Y. 2014. *Strongman dan Kelompok Kekerasan di Jawa*. Banten: FTK Banten Pres.

Purwaningsih, S M dan Thomas Nugroho Aji. 2015. *Sejarah Sosial*. Unesa University Press.

Suhartono. 2010. *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tauchid, M. 2009. *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Kehidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.

### **Jurnal**

Albar Fachri. 2021. Kemunculan Jago Betawi Dan Perkembangan Di Wilayah Tanah Abang Tahun 1880-1920. *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*. Vol 12, No 1.

Gede Wayan Wisnuwardana. 2015. Monetasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Abad XIX. *Sosial Studies*. Vol 3 (2).

Imadudin, Iim. 2015. Perlawanan Petani di Tanah Partikelir Tanjoeng Oost Batavia Tahun 1916. *Patanjala*. Vol 7 (1).

Kurnia Ari. 2012. "Perbanditan Sosial di Klaten 1870-1900". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Runturambi, J S. 2017. Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia. *Antropologi Indonesia*. No 2. Universitas Indonesia.

### **Artikel**

Nanggoro, Hendaru Tri. 2019. "Aksi Bandit Sosial Di Pedesaan". Diakses dari [Historia.id https://historia.id/urban/articles/aksi-bandit-sosial-di-perdesaan-DrLRG/page/4](https://historia.id/urban/articles/aksi-bandit-sosial-di-perdesaan-DrLRG/page/4) diakses pada 13 Mei 2022.

Triyana Bonnie. 2011. "Polisi Zaman Kumpeni" diakses dari Historia.id <https://historia.id/politik/articles/polisi-zaman-kumpeni-v2jZv/page/1> pada 12 Mei 2022.